

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengkomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat di pastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisisosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378).

Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia pembangunan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk tercapainya peningkatan

kualitas hidup masyarakat dan tersebarnya hasil-hasil pembangunan secara merata. Seers menitik beratkan tujuan pembangunan pada tiga hal yaitu untuk mengurangi kemiskinan, menanggulangi pengangguran, dan mengatasi ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (Seers dalam Sudjana, 2004: 178).

Pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat dan lembaga pendidikan khususnya pendidikan non formal dalam rangka pemerataan pembangunan, pengurangan jumlah kemiskinan serta pengangguran dengan melakukan gerakan reformasi melalui pendidikan dan pelatihan serta mencoba memperluas kesempatan kerja yang di tekankan pada pembangunan industri baik industri besar, sedang ataupun industri kecil atau industri rumah tangga. Pembangunan industri yang bersifat padat tenaga kerja di kawasan pedesaan bermaksud untuk mengurangi atau menghentikan arus urbanisasi dari desa ke kota karena para tenaga kerja dapat terserap oleh industri-industri yang ada di pedesaan sehingga pemerataan pembangunan dan pengurangan jumlah kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai, sedangkan pendidikan dan pelatihan merupakan alat yang digunakan untuk membawa masyarakat menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri dengan tuntutan keterampilan dan kecakapan hidup yang harus dimiliki sebagai salah satu pemenuhan kualifikasi kerja di bidang industri.

Paulston menjelaskan tentang teori fungsi yang menekankan tentang pentingnya hubungan pendidikan non formal dengan pengembangan sosial, ekonomi dan budaya (Paulston dalam Sudjana, 2004: 176). Teori ini memberi

makna bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk menumbuhkan dan mengembangkan mekanisme keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai budaya, kesatuan masyarakat, kestabilan ideologi, dan perkembangan ekonomi dalam kesatuan wilayah. Pendidikan non formal dalam pengembangan dan pelaksanaan program memperhatikan beberapa prinsip yakni di dasarkan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang berkembang di masyarakat; berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar; di susun bervariasi sesuai dengan keragaman kebutuhan pendidikan dan belajar; berperan untuk mewujudkan keterkaitan antara perkembangan sosial dan kemajuan ekonomi serta memberikan pengaruh baik terhadap pelestarian nilai-nilai agama dan budaya terhadap perkembangan sosial ekonomi sehingga pengembangan pendidikan yang bersifat pelatihan fungsional akan lebih tepat dibandingkan pendidikan kelas yang bersifat teoritis dalam mempersiapkan tenaga kerja dalam bidang industri maupun usaha mandiri.

Apapun bentuk pembangunan, secara substantive akan selalu di artikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang di rencanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini di maksudkan supaya perubahan yang di ketahui dan sebenarnya yang di kehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus di perluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi

hingga pemanfaatannya, sehingga proses pembangunan yang di jalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Desa Sengonagung dalam meningkatkan ketrampilan dan tingkat perekonomian adalah dengan adanya Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis

kegiatan pokok yaitu lingkungan/fisik, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Seperti dengan memberikan pembinaan melalui pelatihan otomotif bagi masyarakat yang sarannya pada pemuda karang taruna dan berjalan selama satu bulan. Disinilah tujuan pemerintah dalam menumbuhkembangkan partisipasi kelompok masyarakat sosial untuk ikut serta berkeinginan mengubah keadaan perekonomian yang lebih baik dan juga pembangunan yang dinilai mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan diberikan pemberdayaan melalui program pelatihan. Sehingga keberfungsian sosial disini yang menjadi tujuan utama untuk menciptakan kemandirian ekonomi kerakyatan yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dari sini peranan pemerintah sangatlah penting dalam melaksanakan perubahan dengan bentuk pembangunan yang memberikan dampak kemajuan bagi masyarakatnya, khususnya dari tingkat perekonomian dan ketrampilan yang menjadi acuan dalam kemajuan lingkungan masyarakat tersebut. Di Desa Sengonagung Purwosari-pasuruan ini tingkat pembangunan dari sektor pemberdayaan masyarakat sudah berjalan seperti yang dipaparkan di atas, baik itu dari sisi prasarana pembinaan serta pelatihan, namun dari pelatihan yang sudah dilaksanakan tersebut masih kurang optimal, serta tidak ada unsur tahap seleksi pemerataan peserta, serta tidak ada unsur berkelanjutan dan pemanfaatan dari program pemberdayaan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **“Optimalisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat**

melalui program pelatihan otomotif”, peneliti mengharapkan di akhir riset ini pemerintah desa Sengonagung bisa memberikan tanggapan yang lebih dalam terhadap proses pelaksanaan pembangunan, khususnya di tingkat pemberdayaan masyarakat. Peneliti juga sangat antusias dengan mengambil tema pembangunan pemberdayaan ini karena pembangunan yang disertai dengan pemberdayaan masyarakat mampu memberikan pembangunan yang efektif serta menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat dalam membangun sumber daya manusia yang lebih maju dan juga untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran serta menumbuhkembangkan ketrampilan kemandirian guna juga meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi program pelatihan otomotif di Desa Sengonagung?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi optimalisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam program pelatihan otomotif di Desa Sengonagung?
3. Bagaimana strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat di Desa Sengonagung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam program pelatihan otomotif di Desa Sengonagung.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi optimalisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat dalam program pelatihan otomotif di Desa Sengonagung.
3. Untuk mengetahui strategi optimalisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat di Desa Sengonagung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis, memberikan sumbangan penelitian dan memperluas wawasan bagi kajian keilmuan ilmu Administrasi Negara sebagai penerapan teori-teori yang didapatkan oleh peneliti selama di bangku perkuliahan. Hasil penelitian juga dapat dijadikan suatu wawasan, referensi, dan bahan studi perbandingan selanjutnya, juga akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah tentang Optimalisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat pada program pelatihan.
2. Aspek Praktis, memberikan sumbangan dan masukan kepada pihak yang bersangkutan atau bagi pemerintah desa mengenai Optimalisasi pembangunan pemberdayaan masyarakat pada program pelatihan.